

BAB I

PENDAHULUAN

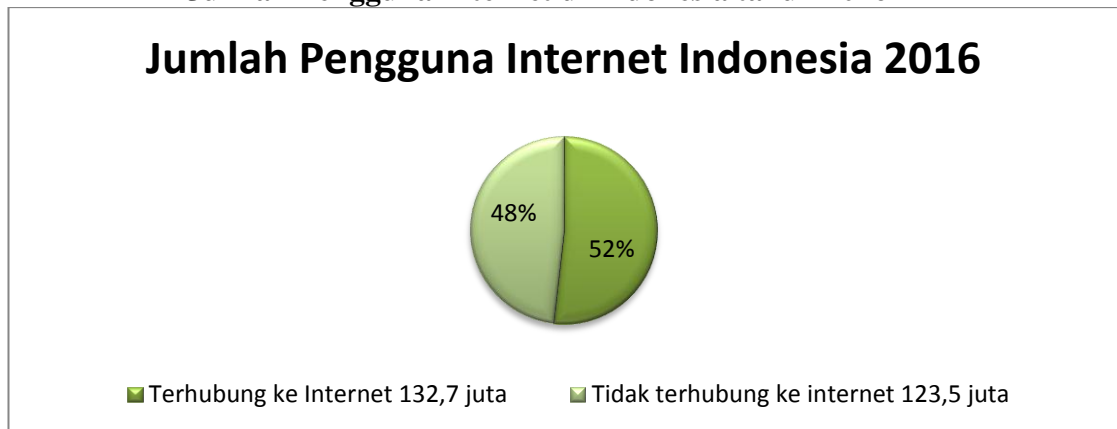
A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat telah memudahkan masyarakat tidak hanya dalam aspek berkomunikasi dengan satu sama lain, tetapi juga dalam aspek mencari dan memperoleh informasi, serta memfasilitasi masyarakat dalam menyebarkan informasi-informasi tersebut dengan sangat cepat, dimanapun, dan kapanpun selama individu tersebut memiliki fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan fitur internet seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar yang telah mendukung fitur internet di dalamnya.

Tercatat dalam survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, bahwa terdapat 132,7 juta penduduk dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet¹. Hal tersebut menandakan bahwa 51,8% penduduk Indonesia sudah memiliki kemampuan dalam mencari, mengakses, dan memperoleh informasi melalui fasilitas internet.

¹ Yoga Hastyadi. *2016 Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, 2016. (<http://teknokompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>) di akses 27 Januari 2017.

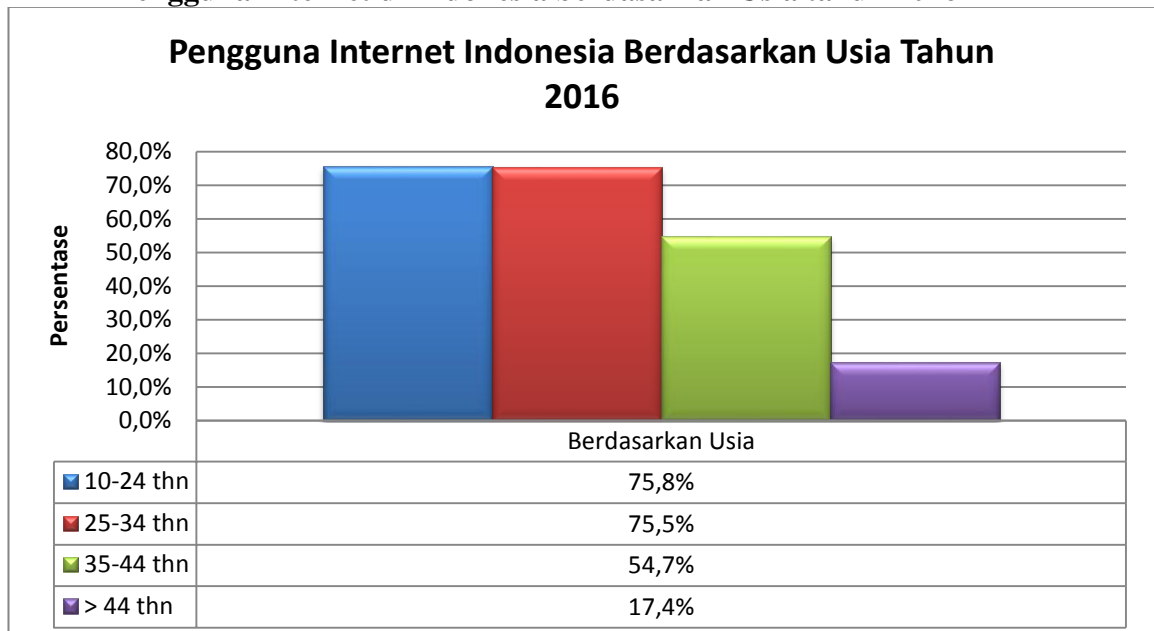
Diagram I.1
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia tahun 2016



Sumber: Survei APJII 2016

Selanjutnya, dalam hasil survey yang dilakukan APJII juga menyatakan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah penduduk yang berusia 10-24 tahun, dimana dalam rentang usia tersebut penduduk Indonesia yang dimaksud merupakan mahasiswa dan pelajar.

Diagram I.2
Pengguna Internet di Indonesia berdasarkan Usia tahun 2016



Sumber: Survei APJII 2016

Hasil survey APJII pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa mahasiswa dan pelajar merupakan pengguna internet dengan persentase jumlah tertinggi dibandingkan dengan penduduk pekerja dan ibu rumah tangga, yaitu 89,7% penduduk pengguna internet adalah mahasiswa, dan 69,8% penduduk merupakan pelajar. Adapun alasan utama penduduk Indonesia mengakses internet adalah agar *update* informasi (25,3%), melakukan hal terkait pekerjaan (20,8%), dan mengisi waktu luang (13,5%).

Di samping itu semua, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, tidak hanya hal positif yang diperoleh penduduk, tetapi juga hal negatif, seperti adanya kasus penyebaran *hoax* yang marak terjadi. Berdasarkan survey APJII, pengguna internet berpendapat bahwa kegiatan berinternet bagi anak masih tidak aman, dengan 101,3 juta penduduk atau 76,4% pengguna Internet menyatakan hal demikian.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan melimpahnya ketersediaan informasi, dan mudahnya masyarakat dalam mengakses serta menyebarkan informasi-informasi tersebut, sehingga menuntut masyarakat untuk memiliki sikap kritis dan analitis dalam memilih jenis dan sumber informasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya secara baik dan benar.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sikap masyarakat yang mendukung perkembangan teknologi ke arah yang positif, adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan di Indonesia memegang arti penting dalam

mensukseskan peserta didik untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan Indonesia, sehingga daya saing dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat meningkat. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, baik pada jalur pendidikan formal, maupun informal. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah guna menyesuaikan tantangan-tantangan, baik internal dan eksternal, yang dibutuhkan dewasa ini.

Selain berkewajiban dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui kebijakan-kebijakannya, pemerintah juga memiliki hak untuk memperoleh hasil dari kebijakan tersebut untuk negara dan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai landasan atau dasar hukum dilaksanakannya pendidikan nasional, yaitu :

“Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif diberikan kesempatan mengembangkan kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara,²

Usaha sadar dan terencana pemerintah yang berwujud program pendidikan harus dibentuk dengan kualitas yang baik, sehingga dapat membawa hasil yang baik terhadap bangsa Indonesia dalam memperoleh sumber daya manusia yang dapat berkompetensi secara global, baik di dalam negeri maupun dalam ranah internasional.

Kurikulum sebagai rencana pemerintah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran telah mengalami perubahan-perubahan demi menyesuaikan tantangan-tantangan dan perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan. Di Indonesia, kurikulum pembelajaran telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali, dimulai dari kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, hingga perubahan terbaru adalah kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 ini merupakan wujud dari kesadaran akan adanya tantangan-tantangan baik secara internal maupun eksternal yang ada di masa depan. Adapun tantangan-tantangan yang ada di masa depan adalah dampak dari perubahan global, kemajuan teknologi informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta seni dan budaya.

Salah satu implikasi dari adanya pengembangan kurikulum 2013, terbentuklah program Gerakan Literasi Sekolah yang secara sadar disusun oleh pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mengatasi rendahnya minat baca peserta didik Indonesia, sehingga dapat

² UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h. 5

menjunjung kemampuan Literasi Informasi para generasi muda penerus bangsa tersebut.

Berdasarkan data persentase penduduk buta huruf yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik, Indonesia telah berhasil melewati krisis literasi dalam artian kemelekhurufan dengan angka persentase buta huruf penduduk Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2016 berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut.

Tabel I.1
Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur,
2014-2016

Tahun	Kelompok Umur		
	15+	15-44	45+
2014	4.88	1.24	12.25
2015	4.78	1.10	11.89
2016	4.62	1.00	11.47

Sumber: bps.go.id

Capaian tersebut menandakan bahwa Indonesia telah melewati krisis literasi dalam artian kemelekhurufan. Namun, Berdasarkan perolehan data mengenai indeks minat baca siswa di Indonesia berdasarkan data statistik UNESCO 2012 mengungkapkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Hal tersebut menandakan bahwa dari 1000 orang penduduk, hanya 1 (satu) penduduk saja yang memiliki minat baca³. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku yang sia-sia yang dilakukan oleh masyarakat, karena kemampuannya untuk membaca yang dilihat dari rendahnya angka buta huruf masyarakat tidak dimanfaatkan untuk membaca karena minat bacanya yang rendah.

³ Republika. *Literasi Indonesia Sangat Rendah*. 2015. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>) di akses tanggal 27 Januari 2017.

Di era teknologi informasi saat ini, literasi tidak lagi hanya sebatas pada kemampuan seseorang dalam membaca, tetapi masyarakat dituntut untuk dapat memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif. Dengan kata lain, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan literasi informasi yang memiliki cakupan yang lebih luas yaitu bagaimana seseorang menelaah informasi berupa teks tersebut secara analitis, sehingga dapat menimbulkan sikap kritis dan reflektif dalam diri masyarakat.

Kebutuhan literasi yang tak hanya mencakup kemelekanhuruf, tetapi juga kemampuan dalam menganalisis informasi di era global ini telah menuntut pemerintah untuk lebih gencar dalam menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”⁴

Berdasarkan ayat tersebut, telah ditegaskan bahwa program literasi juga harus mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan secara intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi. Sesuai dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam membina, menginspirasi atau memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang program Gerakan

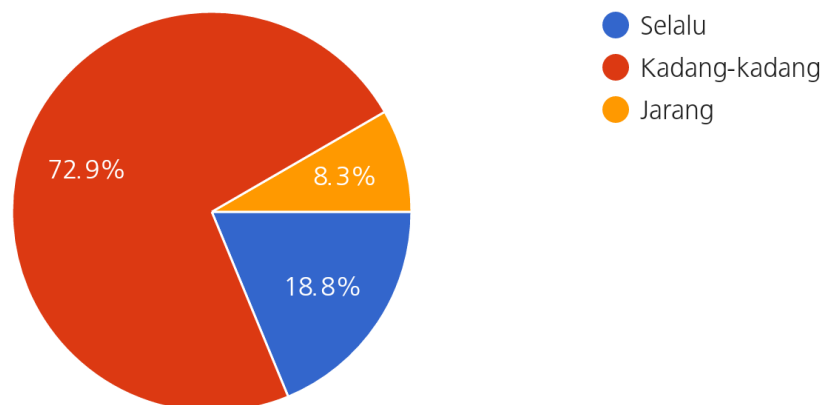
⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016) h. 2

Literasi Sekolah yang membutuhkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, program Gerakan Literasi Sekolah memiliki tiga tahap yang berkesinambungan dan harus dilalui oleh peserta didik, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Program Gerakan Literasi Sekolah ini memiliki kegiatan utama sebagai awal dari pelaksanaan dalam tahap pembiasaan, yaitu kegiatan membaca 15 menit di luar jam pelajaran, dengan harapan dapat meningkatkan rasa cinta membaca, dan kemampuan memahami bacaan peserta didik. Sehingga buku-buku yang menjadi bahan bacaan peserta didik mengusung tema di luar materi pembelajaran, seperti biografi, buku cerita sastra, dan ilmu pengetahuan umum di luar pelajaran.

Namun, selama program tersebut berjalan, peneliti memperoleh fakta lapangan yang diperoleh melalui survey awal dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada siswa SMA, bahwa minat baca siswa SMA terhadap buku pengetahuan masih kurang, dilihat berdasarkan rasa senang dan keinginan untuk membaca siswa, intensitas waktu yang diluangkan untuk membaca, jumlah buku yang dibaca, jenis buku yang dibaca, dsb.

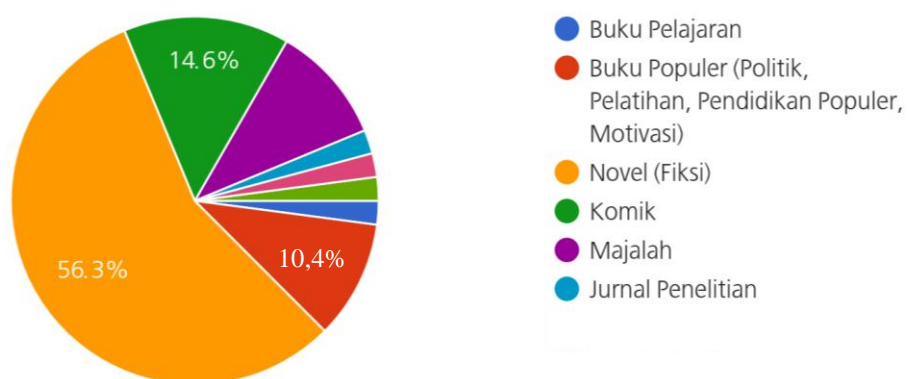
Diagram I.3
Hasil Survey Keinginan Membaca Siswa



Sumber: data diolah Peneliti

Berdasarkan diagram I.3 di atas, sebanyak 72,9% siswa menyatakan bahwa terkadang memiliki keinginan untuk membaca, dimana hasil survey selanjutnya, melalui Diagram I.4 di bawah, dapat diperoleh fakta bahwa sebanyak 56,3% siswa menyatakan bahwa buku yang senang dibaca oleh siswa adalah novel fiksi.

Diagram I.4
Hasil Survey Jenis Buku yang Senang Dibaca Siswa SMA

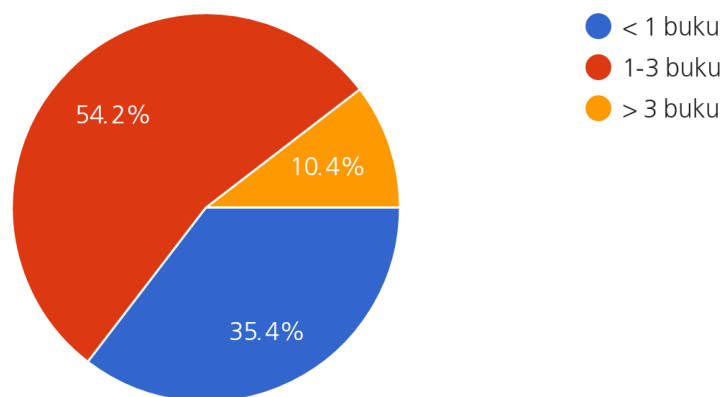


Sumber: data diolah Peneliti

Melalui diagram di atas, dapat pula diketahui bahwa siswa lebih senang membaca buku novel fiksi dibandingkan dengan buku lainnya. Kemudian,

berdasarkan hasil survey dalam hal jumlah buku yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan, 54,2% siswa menyatakan dapat menyelesaikan 1 hingga 3 buku non-pelajaran, 35,4% di antaranya menyatakan tidak dapat menghabiskan satu pun buku dalam satu bulan, sedangkan 10,4% sisanya dapat menyelesaikan lebih dari 3 buku.

Diagram I.5
Jumlah Buku (Non-Pelajaran) yang Dapat Diselesaikan dalam 1 Bulan



Sumber: data diolah Peneliti

Dalam sehari-harinya, 51% siswa mengungkapkan meluangkan waktunya untuk membaca sebanyak 1 hingga 2 jam dalam satu hari. Ketersediaan waktu kosong siswa baik di sekolah maupun di rumah cenderung dihabiskan dengan bermain gadget (60,4%), dimana setelah di survey sedikit lebih lanjut melalui email, gadget cenderung digunakan sebagai media hiburan, diantaranya untuk bermain game, dan berkomunikasi dengan teman melalui media sosial dan *instant messaging*.

Berdasarkan hasil survey tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masalah perihal minat baca yang merupakan salah satu aspek yang menjadi tujuan

dilaksanakannya program Gerakan Literasi Sekolah, khususnya pada tahap pembiasaan, dimana seharusnya pembiasaan 15 menit membaca sebelum pelajaran dapat meningkatkan rasa cinta membaca siswa.

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh melalui fakta lapangan tersebut, perlu dilakukannya upaya untuk mengetahui keberhasilan program Gerakan Literasi Sekolah dalam proses pembelajaran di SMA. Upaya inilah yang dinamakan sebagai evaluasi. Evaluasi sendiri terdiri dari tiga ruang lingkup, antara lain evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Dan sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2003, bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, serta program pendidikan baik melalui jalur formal atau non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di peroleh fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah di SMAN 71 Jakarta.
2. Persiapan-persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 Jakarta.
3. Pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 Jakarta.
4. Sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya program GLS di SMA Negeri 71 Jakarta.
5. Hasil belajar dan minat baca siswa dengan diterapkannya program GLS di SMA Negeri 71 Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada penelitian evaluasi menggunakan model CIPP, dimana yang akan diteliti adalah *Context (C)*, *Input (I)*, *Process (P)*, dan *Product (P)*. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa model ini mengevaluasi suatu program pemrosesan seperti pelaksanaan pembelajaran, karena model ini akan mengarahkan pada obyek sasaran evaluasinya dalam hal proses, masukan, sampai dengan hasilnya.⁵

Terkait keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian evaluasi ini dari segi antara lain: dana dan waktu, maka penelitian ini dibatasi pada Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 Jakarta sebagai salah satu sekolah yang menerapkan program Gerakan Literasi Sekolah dan sebagai salah satu sekolah unggulan dan favorit di kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam *context* program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 terkait dengan latar belakang pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai?
2. Bagaimana kesiapan *input* yang terdapat dalam program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 dalam rangka mencapai tujuan program?

⁵ Suharsimi Arikunto. *Evaluasi Program Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 37

3. Bagaimana *process* yang terjadi dalam program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 terkait dengan pelaksanaan kegiatan menurut prosedur yang ditetapkan?
4. Bagaimana *product* atau hasil dari program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 terkait dengan penilaian terhadap hasil belajar dan minat baca peserta didik yang dicapai?

E. Kegunaan Penelitian

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai salah satu pemenuhan syarat wajib akademi bagi penulis yang merupakan mahasiswa dalam menjalani tahap akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

2) Bagi Sekolah

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan analisa dan evaluasi yang berasal dari pemikiran penulis mengenai program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 71 Jakarta.

3) Bagi Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini berguna untuk menambah bahan pustaka dalam perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna sebagai bacaan, informasi dan ilmu pengetahuan tambahan bagi masyarakat atau para pembaca yang berminat mendalami masalah literasi informasi guru SMA Negeri 71 Jakarta.